

PELUANG DAN TANTANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DI DESA SUNGAI UPIH PROVINSI RIAU

*(OPPORTUNITIES AND CHALLENGES ON THE EMPOWERMENT
PROGRAM OF REMOTE INDIGENOUS COMMUNITY IN SUNGAI UPIH
VILLAGE RIAU PROVINCE)*

Rd. Siti Sofro Sidiq & Andri Sulistyani

Abstrak

Program pemberdayaan komunitas adat terpencil terkait dengan pengembangan kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) memang telah menjadi fokus perhatian pemerintah selama kurun waktu terakhir. Selain berfungsi sebagai sarana pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan di kawasan 3T diharapkan juga akan mampu menjadi penguat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan Wawasan Nusantara. Namun demikian implementasi dari program pemberdayaan hampir selalu mengalami kendala dan bahkan terhenti dengan hasil yang kurang maksimal. Dengan demikian, perlu ditemukan akar dari permasalahan tersebut untuk mendapatkan solusi terbaik melalui analisis sosial. Disamping itu, halangan dan hambatan yang menyebabkan program pemberdayaan tersebut diharapkan juga dapat ditemukan. Lebih lanjut, konsep yang ditemukan juga diharapkan dapat digunakan untuk membuat sebuah model pemberdayaan yang ideal yang mampu mengakomodasi ideologi dan konsep lokal dari KAT sehingga dapat menyatu dengan program pemerintah selaku penentu kebijakan dan eksekutor. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan cara pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suku Asli di Desa Sungai Upih termasuk dalam KAT kategori II sehingga memerlukan pemberdayaan di beberapa aspek seperti penataan rumah, lingkungan, sumber daya manusia, dan ekonomi produktif. Adapun faktor yang mendukung atau peluang program pemberdayaan adalah semangat dan motivasi dari warga KAT, potensi sumber daya alam, dan ekspektasi orang tua untuk pendidikan yang lebih baik bagi anaknya. Selain itu, dukungan dan sinergi dari pemerintah juga turut berkontribusi dalam program pemberdayaan. Disisi lain, tantangannya adalah kondisi perekonomian yang lemah karena pendapatan kepala keluarga umumnya rendah dan kondisi rumah mereka yang tak layak huni, lokasi KAT yang sulit diakses dan mayoritas dari orang tua yang buta huruf.

Kata kunci: Peluang dan tantangan, program pemberdayaan, komunitas adat terpencil, suku Asli, Riau

Abstract

Remote indigenous community empowerment program in relation with the frontier, outermost, and left behind area has become a priority concern of the government. It has twofold function either for development equity and prosperity improvement in frontier, outermost, and left behind area or for Republic of Indonesia's integrity reinforcement as an embodiment of Archipelago. However, the implementations of various community empowerment programs are mostly facing various barriers or even it is terminated with no ideal results. Thus, the root of the problem should be found out in order to obtain the best solution through social analysis. Further, the concept found can be used to build an ideal model of community empowerment program that is able to accommodate the concept and local ideology in remote indigenous community that ties with government as both policy maker and executor of the program. Finding the result of the research, the qualitative approach with descriptive case study method is employed. The data is gathered from informants through in-depth interview, observation, documentation, and literature study. The result suggested that Asli tribe in Sungai Upih Village, Kuala Kampar Sub district, Pelalawan Regency of Riau Province is in category II of remote indigenous community. There are four empowerment required such as the arrangement of settlements and housing, the environment, human resources and productive economy empowerment. The factors that support community empowerment is the spirit and motivation of remote indigenous community residents, the natural potential and the expectations of parents for better education for their children. Besides government support and synergy of all sectors are also owned by remote indigenous community. In addition, the barrier is the weak economic situation because the head of the family income is relatively small with inadequate housing, the location of remote indigenous community is inaccessible and the majority of people who are illiterate.

Keywords: *Opportunities and challenge, empowerment program, remote indigenous community, Asli tribe, Riau province*

PENDAHULUAN

Program pemberdayaan komunitas adat terpencil terkait dengan pengembangan kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) memang telah menjadi fokus perhatian pemerintah selama kurun waktu terakhir. Selain berfungsi sebagai sarana pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan di kawasan 3T diharapkan juga akan mampu menjadi penguat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan Wawasan Nusantara. Hal ini terbukti dengan disahkannya Peraturan Presiden No. 186 tahun 2014 tentang pemberdayaan sosial di komunitas adat terpencil sebagai salah satu wujud nyata perhatian pemerintah terhadap eksistensi dari komunitas tersebut. Komunitas adat terpencil adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Adapun anggota KAT yang terdiri dari individu, keluarga, dan kelompok yang hidup bersama dan saling berinteraksi sebagai satu kesatuan komunitas di lokasi KAT disebut dengan Warga KAT.

Berdasarkan peraturan presiden pasal 4, kriteria dari KAT yaitu memiliki keterbatasan akses pelayanan sosial dasar, tertutup, homogen, penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam, marjinal di pedesaan dan perkotaan, Tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil. KAT terbagi menjadi 3 kategori, yaitu a) Kategori I meliputi warga KAT yang hidup dari berburu dan meramu berbagai potensi sumber daya alam setempat, hidup dalam kondisi sangat sederhana, berpencar dan berpindah dalam jumlah tertentu, paham teknologi yang relatif sederhana, menggunakan alat kerja yang terbatas, demikian pula dengan interaksinya dengan dunia luar yang minim, b) Kategori II yaitu warga KAT yang umumnya hidup dari perladangan berpindah, memiliki wilayah orbitasi hidup untuk mencari nafkah, memiliki

pemahaman teknologi yang lebih variatif, serta sudah mampu berinteraksi dengan dunia luar, dan c) Kategori III, merupakan warga KAT yang dicirikan hidup dari bertani, berkebun, dan/atau nelayan yang telah menetap di wilayah tertentu, serta memiliki keterbukaan dalam berinteraksi dengan dunia luar.

Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang majemuk terdiri dari banyak suku dengan berbagai pola hidup yang spesifik. Beberapa dari suku bangsa tersebut masih dinyatakan sebagai komunitas adat terpencil yang belum sepenuhnya mendapatkan akses terhadap layanan negara. Berdasarkan data Kementerian sosial tahun 2014, komunitas adat terpencil tersebar di 24 provinsi, 207 kabupaten, 801 kecamatan, 1.758 desa, dan 2.019 lokasi dengan jumlah sekitar 231.166 kepala keluarga. Hingga saat ini yang sudah diberdayakan adalah 97.011 kepala keluarga, sedangkan yang belum diberdayakan adalah 130.031 kepala keluarga, dan yang dalam proses pemberdayaan adalah 4.124 kepala keluarga.

Merujuk pada data tersebut, komunitas adat terpencil perlu untuk mendapatkan perlindungan sosial yang inklusif dalam hal kesejahteraan hidup guna meningkatkan harkat dan martabatnya dengan menjadikannya prioritas pembangunan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang digagas oleh pemerintah. Pemberdayaan menurut Rukminto (2000) adalah usaha untuk mengembangkan diri dari keadaan tidak mampu atau kurang berdaya menjadi berdaya, guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya tersebut merupakan sebuah proses yang berlangsung secara terus menerus hingga terjadi sebuah perubahan yang diharapkan.

Definisi tersebut sejalan dengan pemaparan Suharto (2005) bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan rangkaian kegiatan guna memperkuat kekuasaan atau kebudayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang berada dalam kemiskinan. Adapun pemberdayaan sebagai tujuan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial berupa masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah program penguatan sosial supaya masyarakat yang lemah baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik dapat menjadi masyarakat yang berdaya dengan dimilikinya kesadaran untuk mengolah dan mengembangkan potensi yang dimilikinya serta melakukan tindakan secara mandiri.

Adapun yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial terhadap KAT adalah serangkaian kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada KAT setempat untuk menemukan masalah dan kebutuhan beserta upaya pemecahannya berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri, melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya. Dengan dirumuskannya program tersebut secara seksama diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial, namun demikian pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat tersebut acapkali masih tersendat atau berhenti tanpa hasil ideal.

Salah satu contoh komunitas adat terpencil yang masih mengalami kendala dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat adalah Suku Asli di Desa Sungai Upih di Pulau Penyaleh Kabupaten Pelelawan Provinsi Riau. Berbagai program peningkatan kesejahteraan telah dijalankan (Tim Pemetaan Sosial Pemerintah Kabupaten Pelalawan 2014), tetapi fakta menunjukkan bahwa taraf hidup Komunitas Adat Terpencil yang tinggal di dalamnya belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Mereka cenderung tetap hidup dan bertahan dalam keterasingan dan keterbelakangan. Hal ini memunculkan asumsi bahwa diduga terjadi kesalahan persepsi antara pemangku kepentingan pemerintahan yang menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan penduduk Komunitas Adat Terpencil di Desa Sungai Upih yang menjadi objek kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, kiranya layak untuk dicari akar permasalahannya melalui analisis sosial untuk menggali tantangan dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Desa Sungai Upih guna

menemukan solusi terbaik. Analisis sosial merupakan metode atau cara untuk memahami realitas situasi secara mendalam dengan tujuan membantu organisasi merumuskan strategi yang tepat dalam memecahkan masalah yang terjadi (Budiharga dkk. 2007). Metode ini merupakan cara berpikir sehari-hari setiap orang atau organisasi dalam memahami realitas dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Inti dari analisis sosial adalah, a) pendeskripsian fakta-fakta, b) menguraikan dan menganalisis fakta-fakta tersebut dengan cara membandingkannya dengan teori, sehingga diperoleh gambaran atau uraian atas fakta tersebut dalam kerangka yang masuk akal/logis dan sistematis, dan c) menarik kesimpulan, mengungkapkan temuan-temuan permasalahan mendasar serta menangkap makna yang terkandung di balik temuan-temuan tersebut. Analisis sosial dilakukan guna menemukan data Suku Asli sebagai materi untuk membangun model pemberdayaan masyarakat yang ideal yang mampu mengakomodasi konsep dan ideologi lokal komunitas adat terpencil dengan pemerintah selaku pemegang kebijakan dan pelaksana program. Data etnografi diperoleh dalam kegiatan penjajagan awal yang merupakan bagian dari tahapan persiapan pemberdayaan sosial. Tahapan ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan informasi yang akurat, gambaran secara umum tentang Suku Asli yang merupakan komunitas adat terpencil untuk melihat secara menyeluruh, untuk memahami akar penyebab, untuk menyesuaikan dengan kearifan lokal, untuk memahami dan mengapresiasi lingkungan lokal yang akan diberdayakan sebagai pijakan menemukan dan menentukan strategi yang komprehensif dengan mengidentifikasi sumber daya, prioritas, dan konteks dari masalah yang sedang dihadapi. Berdasarkan pemaparan tersebut, makalah ini membahas apa peluang dan tantangan pemberdayaan komunitas adat terpencil Suku Asli di Desa Sungai Upih di Pulau Penyaleh Kabupaten Pelelawan Provinsi Riau?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif guna menggambarkan dan mendeskripsikan karakteristik subjek penelitian secara holistik dan komprehensif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 1) studi dokumen, 2) pengamatan lapangan (*field observatory*), dan 3) wawancara mendalam (*in-depth interview*). Sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian, analisis data dalam penelitian ini sepenuhnya menggunakan metode penulisan deskriptif dengan melibatkan tahap-tahap analisis kualitatif interpretif. Sesuai dengan kaidah analisis kualitatif interpretif, data yang terdiri dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen dianalisis secara terus-menerus selama proses pengumpulan data di lapangan berlangsung (Moleong 2000; Yuswandi dalam Bungin (Ed.) 2004). Tahapan analisis terhadap setiap bentuk data ini dijalankan secara bersama-sama untuk menemukan hasil penelitian.

SEJARAH PERTUMBUHAN SUKU ASLI DI SUNGAI UPIH

Suku asli yang ada di Pulau penyaleh dahulu merupakan suku pertama sebagai Penduduk Asli. Semula penduduknya Pulau Penyaleh atau Pulau Mendul adalah dari Suku Laut Suku Hatas, Suku Utan yang termasuk Proto Melayu (Melayu Tua) dengan kegiatan merakit dan meneratas, penebang kayu. Suku ini termasuk bagian Masyarakat Riau.

Masyarakat Melayu Riau, baik masyarakat sederhana maupun masyarakat yang maju, memiliki norma norma atau kaidah-kaidah dengan mempunyai ciri khas, yaitu beragama islam, adat istiadat Melayu, dan berbahasa Melayu. Salah satu aspeknya adalah system social yang mengandung arti adat istiadat atau filosofinya “adat bersedikan syarak, syarak bersedikan Kitabullah. Makna dari syarak sama dengan mengata, adat sama dengan memakai. Ada tiga konsep adat Melayu Riau Adat yang diadatkan, dan Adat yang teradat. Masing-masing, mempunyai makna “adat sebenarnya adat, Adat yang diadatkan (Suwardi dkk. 2006).

Istilah yang terungkap diatas secara etimologis, menurut Dewi Wulansari (2010) berawal dari bahasa Arab” Hukum dan Adah” sebagai ketentuan dalam kebiasaan. Sebagai aturan yang harus dilakukan dan dikenal secara Nasional terutama di Prov Aceh, ketika kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (167-1636 dalam Buku Hukum Adat Melayu Riau).

Mengacu dengan kondisi Suku Asli yang ada di Kecamatan Kuala Kampar di Pulau Mendul atau Pulau Penyaleh, bahwa Suku Asli tersebut termasuk pada Konsep Melayu Riau. Tetapi pada kenyataannya, bahwa Suku asli ini mempunyai adat istiadat tersendiri. Dengan kenyataan, dalam

menganut agama tidak seluruhnya Islam, masih adanya animism, dan mengakui adanya agama diluar Islam.

Tenas Efendi mengatakan yang dikatakan Suku asli yang ada di prov Riau, adalah Suku Sakai di mandau, Suku Doano Di Indra Giri Hilir, Suku Hutan Di Bengkalis, Suku Talang Mamak Di Indra Giri Hulu, Suku Bonai di Rokan Hulu, Suku Asli atau Suku Akit, di Bengkalis, Kab Kep Meranti, termasuk di Kabupaten Siak, dan Kab Pelalawan. Perubahan kehidupan suku asli tersebut belum optimal seperti masyarakat lainnya. Masih hidup keterbelakangan secara social budaya dan ekonomi.

Yang dikatakan Suku Asli, dahulu adalah Suku Terasing hampir seluruh Kabupaten, Ciri khas suku asli yang ada di Pulau Penyaley ini miskin, tertinggal secara social budaya, masih mencari kehidupan dari satu aspek, yaitu dari pinggiran pantai. Habitat pada pesisir pantai dan berada pada perbatasan Negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura, berdekatan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Perkembangan Suku Akit dari migrasi Ras Vedoit dari Srilangka dan India datang sebelum zaman ais. Mulai singgah di Pulau Penyaley, menyebar ke Bengkalis termasuk saat ini berada di Pulau Pulau kecil, Seperti Pulau Rangsang Desa Sonde, Desa Sokop, dan Desa Sungai Tohor. Ciri khas fisik Suku Akit terlihat raut Wajah seperti Tionghoa, mata Sifit, raut wajah seperti daun Sirih warna kulit variasi tapi umumnya kulit putih, ada yang sawo mateng. Tinggi Badan 150 -170 Cm. Rambut Kriting dan sebagian ikal. Menggunakan bahasa Melayu Tinggi, dengan logat / vocal tidak jelas.

Di Penyaley, Suku Asli atau Akit berada di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dengan jumlah 269 orang tau 9.91 %, etnis Melayu sekitar 89.72 %. dan yang terendah penduduk Etnis Bugis, yaitu 0.37 %. Kecamatan Kuala Kampar berada pada Pulau Penyaley, termasuk terpencil dan paling hilir dengan luas wilayah sekitar 5674,66 km². Mempunyai 9 Desa, 1 Kelurahan. Salah satunya Desa Sungai Upih merupakan bagian dari kecamatan tersebut, luasnya sekitar 7.4 10 Ha. Kecamatan dan desa berada pada perbatasan Negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura. Secara geografis, jarak desa Sungai Upih menuju laut hanya 3 Km, kepinggiran Hutan sekitar 3 Km, Kepelabuhan 1 Km, Ke Kantor Polisi sekitar 35 Km. Dengan curah hujan dalam 2.633,0MM dan Jumlah hujan adalah 10 bulan. Bentang wilayahnya datar, warna tanah kehitaman, dan teksturnya gambut dengan kedalaman 4 Meter.

Desa Sungai Upih mempunyai 3 Dusun, yaitu Dusun Sungai Cina atau Dusun Sungai Raya, Dusun Sakiat dan Dusun Parit Tengah. Jumlah penduduk 2.714 jiwa, yaitu Laki laki 1.409 Jiwa, Perempuan 1.305 Jiwa dan Jumlah Kepala Keluarga 521. Mayoritas usia penduduk Desa Sungai Upih adalah Laki Laki dengan tataran usia sekitar 20 sampai 29, dan Usia 0-9 tahun dengan jumlah 515. Jumlah ketiga terbanyak ada pada tataran usia 30-39 tahun, sedangkan yang paling terendah sekitar usia 50 Tahun sampai 49 tahun.

Persentase pendidikan yang tertinggi yaitu pendidikan tamat Sekolah Dasar sekitar 39.72 %. Yang terendah pada tataran pendidikan Perguruan Tinggi hanya 0.23%. Rasio masalah pendidikan, belum sekolah dan tidak sekolah mencapai 11.93%, dan 36.55%. Dengan jumlah penduduk Desa Sungai Upih yang cukup besar, tetapi pendidikan masih sangat rendah.

Mayoritas mata pencaharian warga desa Sungai Upih adalah petani 1.705 Orang, buruh tani 145 orang dan berkebun menunjukan 501 Orang. Ukuran untuk Desa yang cukup luas, dan petani yang cukup tinggi, jumlah buruh tani belum sebanding. Jenis mata pencaharian lain yang ada adalah nelayan 37 orang, dukun beranak 3 orang, guru 38 orang dan yang terendah adalah sebagai bidan hanya 1 Orang dan mata pencaharian di bidang lain cukup memprihatinkan.

PROGRAM PEMBERDAYAAN UNTUK SUKU ASLI DI SUNGAI UPIH

Berdasarkan data yang dihimpun dalam studi kelayakan yang merupakan bagian dari tahapan persiapan pemberdayaan guna mengumpulkan data etnografi dan sosiologi lokasi KAT, maka diketahui bahwa Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Prov Riau. Sasaran program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil telah memenuhi syarat, yaitu termasuk Katagori 2(dua). Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1, ayat 2 dalam Peraturan Presiden RI No 186 Tahun 2014, dengan jabaran, bahwa hal tersebut sebagai sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi dan atau social budaya, dan miskin, terpencil, dan rentan social ekonomi. Habitat Komunitas Adat Terpencil termasuk Pesisir, berada di luar kawasan hutan lindung. Adapun rincian secara mendetail kedua dusun tersebut adalah sebagai berikut:

Dusun Sungai Raya

Pemukimannya mengelompok dalam sub dusun, yaitu dari sentralnya Dusun Sungai Cina. Berada pada pinggiran aliran sungai kecil, berdekatan dengan pantai. Kondisi rumah tidak layak. Terbuat dari semperan kayu, dan tidak mempunyai ventilasi. Tinggi rumah sangat rendah, ketika air pasang dari laut, maka kebanjiran. Atap terbuat dari daun Rumbia. Ukuran rumah warga KAT variatif, dari ukuran 2.05 X 3, sampai ukuran Rumah 5 X 7. Dalam satu rumah ada yang berisi dengan 2 KK. Lahan pemukiman tidak milik warga serta tidak mempunyai penerangan. Lingkungan pemukiman tidak tertata dengan baik.

Aspek administrasi kependudukan, masih ada yang tidak mempunyai KTP/dan Kartu Keluarga. Akte Kelahiran anak rata rata tidak mempunyai. Sedangkan agama /religi berdasarkan pengakuan warga adalah agama Kristen, tetapi tidak mempunyai tempat ibadah, Keyakinan terhadap roh jahat masih sangat tinggi. Dari segi kesehatan, tidak ada tempat berobat, pengobatan masih menggunakan dukun, dan ramuan seadanya dari lingkungan pemukiman, Sumber air bersih 1 unit berada diluar lingkungan rumah. Aliran Sungai masih dimanfaatkan untuk mencuci pakaian dan mencuci piring.

Di bidang pendidikan, pada umumnya pendidikan orang tua buta huruf tidak bisa tanda tangan. Menjadi kesulitan ketika mendapatkan bantuan langsung. Usia sekolah rata-rata mencapai pada tingkat sekolah dasar kelas 3 (tiga). Sarana Pendidikan berada ditempat Dusun lain, jaraknya 4 Km sampai 8 Km ke Ibukota desa. Mayoritas mata Pencaharian rata-rata Buruh Nelayan, dan penghasilan dalam satu hari tidak menentu. Hanya mendapatkan mulai dari Rp 50.000, - (lima puluh Ribu Rupiah) sampai 75.000, tidak ada pasar, dan warung. Sedangkan untuk pelayanan sosial dasar, tidak ada, adanya di Pusat Desa.

Dusun Sungai Sakiat

Kehidupan Suku Akit yang didusun Sakiat adalah pemukiman mengelompok dan ukuran rumah rata-rata 3 X 4. Berada dipinggiran pantai, Tinggi rumah tidak memadai. Terbuat dari semperan kayu, lantai dari semperan kayu, tidak mempunyai dinding yang layak. Atap terbuat dari rumbia. Lahan pemukiman bukan milik warga. Semua rumah tidak mempunyai penerangan. Untuk adminstrasi kependudukan, masih ada yang tidak mempunyai KTP dan KK, sehingga jika ada bantuan langsung, petugas mendapatkan kesulitan. Rata-rata warga tidak mempunyai Ake Kelahiran.

Suku Asli di Dusun Sungai Sakiat, masih mempunyai kepercayaan kepada roh-roh halus. Tercatat 12 KK telah masuk Agama Islam, tetapi dalam pembinaan keagamaannya belum optimal. Tempat ibadah tidak memadai. Dan tempat tersebut masih sangat sederhana dengan ukuran 6 meter X 6 meter. Atap terbuat dari plastic, lantai tikar dari daun nipah, campur dengan terpal. Tidak mempunyai dinding, sehingga jika malam hari tidak dapat digunakan. Di Bidang kesehatan, dilingkungan pemukiman tidak mempunyai sumber air bersih, untuk MCK menggunakan Air payau (serapan). Pemukimannya sangat berdekatan dengan pantai, sehingga jika air pasang dari laut

sering kebanjiran. Tinggi pemukiman hanya 1 meter. Tidak ada sarana pengobatan. Jika ada yang sakit masih menggunakan obat dari dukun. Untuk melahirkan masih sederhana (dukun) beranak.

Warga yang ada di dusun Sakiat, rata-rata orang tua buta huruf, anak-anak usia sekolah, ada yang sekolah dan ada yang tidak melanjutkan. Karena tidak ada sarana pendidikan. Adapun mata pencaharian umumnya buruh nelayan dan nelayan yang tidak mempunyai peralatan yang memadai. Sehingga dalam penghasilan rata-rata hanya sekitar Rp 5- Rp 100, tetapi kadang-kadang tidak mendapatkan penghasilan. Hidup sehari-hari yang paling sering adalah mencari loka (siput). Menghasilkan hanya 1-2 Kg. kadang-kadang untuk dikonsumsi. Pelayanan Sosial dasar, di dusun ini tidak ada sama sekali sarana prasarana. Tidak ada warung, tidak ada tempat berobat, tidak ada untuk anak sekolah. Untuk ibadah pun sangat sederhana.

Sistem kekerabatannya masih kental, pucuk pimpinan (batin) masih berperan. Sistem Patrikhat, karena menggunakan garis keturunan dari bapak dan segala keputusan menggunakan sistem musyawarah Suku tersebut. Adat perkawinan menggunakan adat istiadat Melayu Riau. Jika ada kematian, kelahiran termasuk perkawinan sesuai dengan aturan Batin yang telah disepakati. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan kedua dusun tersebut secara umum masih relatif rendah dengan bukti dari kondisi pemukiman relatif tidak layak, penghasilan sangat rendah dan mata pencaharian pokok sebagai pengumpul loka dan sebagai buruh tani. Umumnya tidak mempunyai alat transportasi, dan alat-alat kerja. Intensitas kunjungan dengan etnis lain sangat terbatas, dikarenakan antara dusun dengan dusun jauh dari 4 Km sampai 8-12 km.

Berdasarkan data etnografi tersebut maka terdapat empat prioritas pemberdayaan. Pertama dalam aspek Tipe Penataan Perumahan Dan Pemukiman. Tipe penataan perumahan terpencar dan mengelompok. Antara rumah dengan rumah warga dusun 1 dengan Dusun lain berjauhan, sehingga sulit untuk mengadakan interaksi (terbatas). Posisi rumah dengan aliran sungai sangat berdekatan, dan berdekatan dengan pantai. Interaksi dengan Suku yang lain khususnya dengan Mayoritas Suku Melayu kurang akrab. Kondisi rumah pada umumnya tidak layak. Terlihat terbuat dari kayu semperan dan dinding rumah terbuat dari kayu semperan. Lantai dari papan. Rumah rata-rata tidak mempunyai ventilasi. Hanya dua pintu, depan dan belakang. Umumnya rumahnya tidak pembatas (tidak ada kamar) antara dapur dan ruang tidur bersatu.

Prioritas pemberdayaan dikhususkan untuk kedua dusun ini adalah pemukiman (rumah utuh) 1 rumah disarankan untuk satu keluarga (KK) diutamakan kamar tidur, ruang tamu dan ruang keluarga, dan tempat masak (dapur) harus terpisah. Rumah warga yang ada sangat tidak layak. Selain rumah, maka harus didukung oleh fasilitas MCK termasuk peralatan rumah tangga harus memadai disesuaikan oleh keinginan warga tersebut.

Kedua adalah Prioritas Sumber Daya Manusia karena pada umumnya warga kedua dusun tersebut masih ada yang buta huruf. Bagi anak-anak usia sekolah sangat penting diberikan pendidikan formal. Pendidikan merupakan faktor utama untuk kemajuan Suku Bangsa. Dengan pendidikan ditingkatkan, maka warga akan mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang positif, sehingga masa depan sangat cerah. Dalam lingkungan pemukiman harus diadakan tempat belajar bersama, dengan pendamping sehingga akan menjadi motivasi yang kuat bagi generasi warga tersebut.

Ketiga Prioritas Pemberdayaan Lingkungan. Prioritas pemberdayaan lingkungan sangat penting, terutama jalan untuk menuju kelokasi KAT diperlukan lebih lancar, diutamakan memperbaiki semenisasi. Jika masih jalan tanah, maka diperlukan menjadi pembangunan semenisasi. Dengan sarana jalan yang baik, maka akan mempengaruhi warga untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan warga lain. Anak-anak usia sekolah tidak akan terkendala. Dengan penataan lingkungan yang memadai hasil dari nelayan atau hasil dari buruh nelayan akan lebih lancar dan pihak pemerintah dari berbagai instansi terkait akan lebih mudah untuk melaksanakan program pemberdayaan pada warga.

Keempat, Potensi Ekonomi Produktif. Potensi ekonomi kedua dusun tersebut, terlihat pada diluar lingkungan pemukiman. Lahan lahan belukar belum dapat dimanfaatkan oleh warga Suku Asli. Pulau Penyalei sangat berpotensi dalam aspek pertanian terlihat adanya Kebun Kelapa, Kebun Karet dan Kebun pinang. Termasuk berada dipinggiran pantai dan Sungai sebagai mata pencaharian utama para warga tersebut. Dengan tidak ada pasar dilingkungan warga, hasil dari nelayan tidak dapat segera untuk diperjual belikan. Warga juga tidak mempunyai peralatan yang memadai, sehingga produksi tidak optimal. Sawah yang ada di seputaran lingkungan desa Sungai Upih dapat dikerjakan bersama dengan warga KAT, sehingga warga tidak mendapatkan penghasilan dari nelayan saja.

PELUANG DAN TANTANGAN PEMBERDAYAAN SUKU ASLI DI SUNGAI UPIH

Untuk dapat melaksanakan program pemberdayaan pada warga KAT, maka harus dianalisis secara seksama faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan komunitas adat terpencil Suku Asli di Sungai Upih. Dengan menggunakan analisis SWOT, ditemukan aspek *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang), dan *threat* (ancaman).

Kekuatan yang dimiliki oleh Suku Asli yang dapat berkontribusi terhadap kelancaran program pemberdayaan. Pertama, adanya semangat dan motivasi yang kuat untuk bertahan hidup dari kondisi yang sangat sederhana. Semangat dan motivasi untuk bertahan hidup merupakan sebuah modal untuk kelancaran program pemberdayaan asalkan sesuai dengan harapan masyarakat. Kesesuaian ini penting mengingat program pemberdayaan tidak hanya sekedar implementasi kebijakan tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Seperti halnya yang dipaparkan oleh Sumardjo dan Saharudin (2006) partisipasi masyarakat diperlukan karena partisipasi berarti: (1) mensukseskan program secara lebih terjamin dan lebih cepat; (2) mendekatkan pengertian pihak perencana/ pengelola dengan kebutuhan golongan sasaran; (3) media untuk memupuk keterampilan masyarakat, kekeluargaan, dan kepercayaan diri; dan (4) mencapai partisipasi positif sebagai ciri khas masyarakat modern.

Kedua, Potensi Alam sangat mendukung untuk memberikan pengalihan sumber mata pencaharian warga, dari seorang nelayan berangsur menjadi petani. Hal ini karena nelayan merupakan pekerjaan yang berisiko tinggi dalam pengelolaan usahanya. Mubyarto (1996) berpendapat bahwa nelayan dengan alat tangkap sederhana sangat rentang dengan lingkaran kemiskinan. Penyebabnya adalah pekerjaan nelayan sangat tergantung pada keadaan cuaca (ombak) dilaut atau dengan kata lain kemiskinan nelayan disebabkan oleh karena kehidupan mereka tergantung pada faktor alam, jika musim baik maka mereka akan hidup dengan baik, dan jika musim tidak akrab maka akan merugi dan tidak berbuat apa-apa sehingga hidup tak tentu. Mubyarto & Loekman (1987) dalam Ramachandran & Guimares (1991) juga menjelaskan bahwa nelayan tradisional dengan kehidupan tergantung kepada perairan laut, yang faktor cuaca mempengaruhi hasil tangkapan atau hasil produksi ikan. Hal ini apabila cuaca baik maka hasil tangkapan akan meningkat, sebaliknya cuaca buruk akan tidak melaut. Di sisi lain kemiskinan nelayan adalah keterbatasan sarana produksi yang dimiliki dan masih tradisional.

Pengalihan sumber mata pencaharian menjadi petani tentu juga harus didukung oleh pemerintah setempat dan warga mendapatkan pelatihan yang sesuai. Menurut Harsono (2009), aspek pendidikan petani berkontribusi terhadap keberhasilan dan kemandirian petani. P. Zahriyani (2009) menambahkan bahwa usaha untuk meningkatkan pemberdayaan bagi petani adalah melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian yakni dengan memfasilitasi usaha tani dengan memberikan pendidikan formal maupun non formal berkaitan dengan pertanian, misalnya penyuluhan secara berkala.

Kekuatan ketiga adalah harapan orang tua orang tua akan adanya peningkatan dan sarana sekolah bagi anak anaknya. Sehingga masa depan anak warga mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Ali (2009) menyatakan bahwa pendidikan merupakan sektor yang paling strategis dalam upaya pembangunan karena dengan pendidikan individu tidak hanya mempunyai bekal pengetahuan tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan

masyarakat. Dengan demikian, keberadaan sarana dan prasarana mutlak diperlukan guna menjamin keberlangsungan proses pendidikan.

Kelemahan yang dimiliki oleh suku Asli, berupa pemukiman pada umumnya tidak layak dan pemukiman sangat alami. Selain itu ekonomi sangat lemah, penghasilan kepala keluarga tidak memadai dan relative kecil, Religi (Agama) hanya pengakuan saja, Pendidikan orang tua rata rata buta huruf. Hal ini akan menjadi boomerang bagi kehidupan keluarganya, sehingga hidup serba kekurangan. Kondisi ini tentu menghambat pemberdayaan karena baik aspek pemenuhan kebutuhan dasar maupun aspek lain yang saling berkaitan seperti perekonomian dan pendidikan yang tidak memadai menjadikan masyarakat tetap berada dalam kondisi dibawah standar.

Peluang untuk kesuksesan PKAT Suku Asli adalah perhatian seluruh sektor /dinas terkait sangat kuat untuk memajukan warga Komunitas Adat Terpencil. Dengan kerjasama antara warga dan pemerintah, maka warga menjadi hidup sejahtera. Dukungan penuh mulai dari kepala Desa, Kecamatan Kuala Kampar, Dinas Sosial dan Kesejahteraan, serta tingkat dinas Sosial Provinsi memberikan perhatian penuh untuk pelaksanaan pemberdayaan. Menurut Supriatna (2000), faktor utama yang berpengaruh terhadap keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah perilaku birokrasi pemerintahan, dukungan birokrasi pemerintahan lokal, fungsi birokrasi pemerintahan local terhadap pembangunan sosial, tingkat pendidikan masyarakat, dan akses-akses masyarakat terhadap informasi program.

Ancaman yang menghambat proses pemberdayaan yaitu Lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Prov Riau berada pada Pulau terpencil yang berdekatan dengan provinsi Kepulauan Riau, dan berbatasan dengan Negara Tetangga. Untuk menuju lokasi tersebut memerlukan satu hari dan penggunaan armada mulai dari Roda 4, armada speed boat, dan roda dua. Hal ini menunjukkan tantangan yang sangat berat jika mempunyai kendala cuaca, maka akan sulit untuk sampai tujuan.

Sebagaimana penjelasan Cheema dan Rondinelli (1983), salah faktor yang menghambat pemberdayaan adalah keterbatasan akses dari masyarakat terhadap program atau kegiatan. Keterbatasan akses ini bisa terjadi karena keterisolasian (keterasingan) secara geografis maupun keterasingan secara sosial. Masyarakat yang hidup di daerah terpencil relatif lebih susah dijangkau, sehingga seringkali mereka tidak bisa mengakses suatu kegiatan atau program yang sebetulnya dapat meningkatkan kehidupan ke arah yang lebih baik.

KESIMPULAN

Suku Asli Di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau merupakan komunitas adat terpencil kategori II yang memiliki keterbatasan baik dari segi infrastruktur, mata pencaharian, pendapatan, pendidikan, maupun di bidang kesehatan. Dengan melihat data etnografi maka diperlukan pemberdayaan dalam 4 hal yaitu penataan pemukiman dan perumahan, lingkungan, sumber daya manusia serta ekonomi produktif. Adapun faktor yang mendukung pemberdayaan masyarakat adalah semangat dan motivasi warga KAT, potensi alam, dan harapan orang tua terhadap pendidikan anak yang lebih baik. Selain itu dukungan pemerintah dan sinergi antar sektor juga dimiliki oleh KAT ini. Sementara itu yang menjadi penghambat adalah keadaan ekonomi yang lemah karena penghasilan kepala keluarga relative kecil, pemukiman yang tidak layak, lokasi KAT yang sulit dijangkau serta orang tua yang mayoritas buta huruf.

RUJUKAN

- Ali, Mohammad. 2009. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*. Bandung: PT. Bhakti Utama.
- Budiharga, W. dkk. 2007. *Organisasi Masyarakat Sipil: Pembelajaran Penguatan Kapasitas untuk Perubahan Sosial*. Jakarta: Remdec Swaprakarsa.
- Bungin, B. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arab Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grasindo Persada.
- Cheema, S. & Rondinelli, D. 1983. *Decentralization and Development*. California: Sage Publications.

- Harsono. 2009. *Distribusi Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Petani*. Jakarta: CV: Rajawali.
- Moleong, L. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. 1996. *Strategi pembangunan masyarakat desa di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramachandran, H. & Guimares, J.P De Campos (Ed). 1991. *Integrated Rural Development in Asia*. New Delhi: Concept Publishing Company.
- Rukminto, Isbandi. 2000. *Psikologi Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Dasar-Dasar Pemikiran. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Suharto, E. & Yuliani. 2005. *Analisis Jaringan Sosial: Menerapkan Metode Asessmen Cepat dan Partisipatif (MACPA) Pada Lembaga Sosial Lokal di Subang, Jawa Barat*: <http://www.policy.hu/suharto/mak-Indo4.html>. Diakses pada 2 Juli 2016.
- Sumardjo dan Saharudin. 2006. Tajuk Modul EP-523: *Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. Bogor : Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB.
- Supriatna, Tjahja. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Suwardi, M.A. Effendi., Suwanto., Nizami Jamil., Daeng Ayub Natuna., Zulkifli., dan Husnan Sekh. 2006. *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau.
- Wulansari, Dewi. 2010. *Hukum Adat Indonsia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Zahriyani, P. 2009. *Pembangunan Pertanian di Era Globalisasi*. Jakarta: PT Pelita Harapan.
- Zahriyani, P. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014, Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 12 Tahun 2015, Direktorat Pemberdayaan komunitas Adat Terpencil Direktorat Jenderal Pemberdayaan Dan Penanggulangan Kemiskinan Kementrian Sosial Republik Indonesia, tahun 2015*
- Tim Pemetaan Sosial. 2014. *Laporan Pemetaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*. Kabupaten Pelalawan: Dinas Kesejahteraan Sosial.

Rd. Siti Sofro Sidiq
University of Riau
Email: sitisofrost@yahoo.com

Andri Sulistyani
University of Riau
Email: aan.andrisulistyani@gmail.com

Diserahkan: 11 Oktober 2017

Diterima: 6 Desember 2017